

LAPORAN PENELITIAN



**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK SEBAGAI HAK ASAL USUL
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)**

PUSAT STUDI : PEMBANGUNAN DAERAH

OLEH :

Ketua : Masmu'ah, SH, MHum (NIP : 19510625 198103 2 001)
Anggota : Anggit Wicaksono, SH, MH (NIDN : 0627077803)
Dwiyana Achmad H, SH, SHI, MH (NIDN : 0631078402)

**Dibiayai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja
Universitas Muria Kudus Tahun Anggaran 2015-2016**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengelolaan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus).
2. Bidang Penelitian : Lanjutan/Pembangunan Daerah
3. Ketua Pelaksana :
 - a. Nama Lengkap : Masmu'ah, SH, MHum
 - b. NIP/NIS : 19510625 198103 2 001
 - c. NIDN : 0025065105
 - d. Jabatan/Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/Pembina Tk. I / IV b
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum
 - f. Program Studi : Ilmu Hukum
 - g. Alamat Rumah : Jl. UMK Utara No. 1 Kudus
 - h. No. Telp/e-mail : 081225292688
4. Anggota Pelaksana :
 1. Anggit Wicaksono, SH, MH
(NIDN : 0627077803)
 2. Dwiwana Achmad Hartanto, SH,SHI,MH
(NIDN : 0631078402)
5. Mahasiswa : 2 (dua) orang
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
7. Anggaran Biaya :
 - a. APB UMK : Rp. 4.500.000,00
 - b. Sumber lain : Rp. 0,00

Kudus, 30 April 2016

Mengetahui,
Dekan

Ka Pusat Studi
Pembangunan Daerah

Ketua Pelaksana

Dr. Sukresno,SH, MHum
NIP: 195506011983031002

Dr. Drs. Agus Sunarno H, SH,S.Pd,MM
NIP: 195506261984031001

Masmu'ah, SH, MHum
NIP: 195106251981032001

Menyetujui :

Rektor

Ketua Lembaga Penelitian UMK

Dr. Suparno, SH, MS
NIS: 0610701000001014

Dr. Dra. Mamik Indaryani, MS
NIS: 0610702010101010

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Ketentuan dalam UU Desa tersebut mengharuskan adanya perubahan paradigma terhadap desa, di mana menempatkan desa sebagai subjek bukan objek terkait pembangunan di desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah terkait pengelolaan tanah bengkok. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan ADD. Adanya penghasilan tetap dan tambahan ini menimbulkan polemik bagi berlangsungnya pemerintahan desa, karena adanya Undang-undang Desa dianggap menghapus kewenangan pemerintah desa untuk menggarap tanah bengkok sebagai kompensasi atas jabatannya.

Mendasarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini membahas permasalahan: 1) Bagaimana kedudukan tanah bengkok sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus? 2) Bagaimana pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus? 3) Bagaimana pola penggajian Perangkat Desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kudus? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Lokasi Penelitian wilayah Kabupaten Kudus, dengan pembatasan lokasi penelitian, yaitu meliputi Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Desa Rendeng Kecamatan Kota, Desa Jepang Kecamatan Mejobo, dan Desa Dukuh Waringin Kecamatan Dawe. Pemilihan keempat desa tersebut karena masing-masing desa mempunyai ciri khas keadaan geografis tersendiri di antara yang lain. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi dengan teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata kunci: Tanah Bengkok, Hak Asal Usul, UU Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Roadmap Penelitian	5
F. Target Luaran	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Teori/Konsep	6
1) Sejarah Tentang Pemerintahan Desa	6
2) Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa Terkait Pengertian Desa, Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Harta Kekayaan Desa dan Tanah Bengkok	9
3) Harta Kekayaan Desa dan Penghasilan Pejabat Desa Menurut Hukum Adat	22
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir	27
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan yang digunakan	31
C. Teknik Sampling	31
D. Metode pengumpulan data	32
E. Metode Analisis data	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus	34

A.1. Profil Kabupaten Kudus	34
A.2. Wilayah Administratif Desa Gondangmanis	33
A.3. Wilayah Administratif Desa Rendeng	34
A.4. Wilayah Administratif Desa Jepang	35
A.5. Wilayah Administratif Desa Dukuhwaringin	36
B. Analisis pengelolaan tanah bengkok sebagai hak asal usul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Kabupaten Kudus)	39
C. Hasil Penelitian	44
Bab V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	53
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57
a. Curriculum Vitae Peneliti	57
b. Kuesioner	63
b. Penggunaan Anggaran	65
c. Surat Tugas	